

PENERAPAN BAHASA YANG BERETIKA DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB WARGA DIGITAL

Iin Indiyani¹, Syafina Yunia Rahma²,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

iinindiyani11@gmail.com¹, finasya59@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan informasi dan teknologi telah memindahkan pola interaksi sosial dari ruang fisik ke ruang digital, terutama dalam interaksi media sosial. Perpindahan ini memerlukan pemahaman baru tentang etika bahasa sebagai bentuk tanggung jawab dalam kewarganegaraan digital. Studi ini menganalisis bagaimana etika bahasa diterapkan di media sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku etika bahasa, serta bagaimana etika tersebut mencerminkan tanggung jawab kewarganegaraan digital. Metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait komunikasi digital dan kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pada bahasa yang digunakan di media sosial erat kaitannya dengan kesadaran moral, kompetensi literasi digital, dan pemahaman terhadap norma-norma komunikasi yang berlaku. Penelitian ini juga menyarankan bahwa pola komunikasi di ruang siber dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya digital, identitas kelompok, latar belakang sosial pengguna, dan pengaruh globalisasi. Pelanggaran etika bahasa berpotensi menimbulkan dampak pada aspek sosial, psikologis, bahkan hukum, sementara penggunaan bahasa yang sopan dapat memperkuat kualitas hubungan interpersonal dan membangun ruang digital yang sehat.

Kata Kunci: etika bahasa; media sosial; warga digital; literasi digital; komunikasi digital; kewarganegaraan digital.

Abstract

The development of information and technology has shifted social interaction patterns from physical spaces to digital spaces, especially

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

in social media interactions. This shift requires a new understanding of language ethics as a form of responsibility in digital citizenship. This study analyzes how language ethics are applied in social media, the factors that influence ethical language behavior, and how these ethics reflect digital citizenship responsibilities. A qualitative method with a literature review approach was used to collect data from various academic literature, scientific journals, and documents related to digital communication and citizenship. The results show that the application of ethics in the language used on social media is closely related to moral awareness, digital literacy competence, and understanding of applicable communication norms. This study also suggests that communication patterns in cyberspace are influenced by various factors, including digital culture, group identity, users' social backgrounds, and the influence of globalization. Violations of language ethics have the potential to impact social, psychological, and even legal aspects, while the use of polite language can strengthen the quality of interpersonal relationships and build a healthy digital space.

Keywords: language ethics; social media; digital citizens; digital literacy; digital communication; digital citizenship.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi utama bagi masyarakat modern. Aktivitas komunikasi yang berlangsung setiap hari di platform digital tidak hanya berdampak pada cara individu berinteraksi, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait tanggung jawab etis dalam berkomunikasi. Dalam konteks tersebut, penggunaan media sosial menuntut penerapan bahasa yang beretika sebagai bentuk kepedulian warga digital terhadap terciptanya ruang komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa etika digital diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif media sosial dan memperkuat kualitas interaksi masyarakat (Nana dkk., 2025). Dengan demikian, kesadaran etis dalam berbahasa menjadi pilar penting bagi terciptanya lingkungan digital yang harmonis dan produktif.

Secara lebih luas, etika memiliki peran mendasar dalam membimbing manusia menentukan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu seseorang

menimbang pilihan, bertindak secara tepat, serta memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap orang lain. Konsep ini dapat diterapkan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas berbahasa di platform digital yang kini menjadi bagian penting dari interaksi sosial masyarakat modern (Satar, 2022). Dalam konteks warga digital, etika berbahasa tidak hanya mencerminkan kepribadian individu, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan komunikasi di ruang publik digital.

Fenomena penggunaan bahasa Indonesia di media sosial memperlihatkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, media sosial membuka ruang bagi kreativitas berbahasa, ekspresi identitas, dan eksperimen linguistik yang sering kali mengikuti tren dan kebutuhan komunikasi yang cepat. Kreativitas tersebut menjadi bagian dari budaya digital yang mendorong pengguna tampil menarik, adaptif, dan relevan di tengah arus informasi yang padat. Namun, di sisi lain, fleksibilitas ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin kaburnya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan terhadap norma kebahasaan menjadi isu penting yang perlu diperhatikan, terutama karena warga digital memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia sebagai identitas kolektif (Ulinnuha & Hikmah, 2025). Maka, upaya menyeimbangkan kreativitas digital dengan penerapan bahasa yang beretika menjadi langkah strategis dalam membangun budaya komunikasi digital yang konstruktif.

Keterkaitan antara etika berbahasa dan keterampilan berkomunikasi juga menjadi aspek penting dalam mencermati perilaku warga digital. Komunikasi yang efektif menuntut kejelasan pesan, ketepatan diksi, dan kesadaran terhadap konteks. Etika berbahasa memperkuat kemampuan tersebut dengan memastikan bahwa pesan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Ketika seseorang mampu menggabungkan keterampilan komunikasi yang baik dengan sikap etis dalam menyampaikan pesan, ia berkontribusi pada terciptanya lingkungan digital yang lebih inklusif, saling menghargai, dan produktif (Benimaking, M., & Setyaningsih, 2025). Statement penting di sini adalah bahwa kualitas komunikasi digital bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh karakter dan tanggung jawab moral penggunanya.

Selain itu, hubungan antara keterampilan komunikasi dan penggunaan media sosial menjadi semakin kuat seiring meningkatnya peran platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memberi kecepatan, efisiensi, dan jangkauan luas dalam menyampaikan informasi. Namun, tanpa dibarengi kemampuan komunikasi yang matang dan komitmen terhadap etika berbahasa, keunggulan tersebut dapat berubah menjadi sumber disinformasi,

konflik, dan misinterpretasi. Karena itu, warga digital perlu membangun kehadiran online yang positif melalui penggunaan bahasa yang bijaksana, sopan, dan bertanggung jawab. Praktik berbahasa yang beretika bukan hanya mencerminkan kualitas diri, tetapi juga menunjukkan kontribusi seseorang dalam membentuk ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi banyak orang.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan bahasa yang beretika dalam aktivitas bermedia sosial serta dampaknya terhadap perilaku warga digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka, sehingga seluruh data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang sesuai dengan tema etika berbahasa dan tanggung jawab digital.

Dalam penelitian kualitatif, menjaga mutu dan keandalan hasil studi menjadi unsur yang sangat penting. Upaya tersebut berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan dalam konteks penelitian lain tanpa kehilangan ketepatan makna maupun relevansinya. Untuk memastikan hal tersebut, peneliti kualitatif biasanya menerapkan sejumlah langkah dan pendekatan tertentu yang dirancang untuk memperkuat konsistensi dan keabsahan data (Wulandari, dkk).

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman yang dikemukakan oleh Mardalis (1999 dalam Mirzaqon, 2017), bahwa pengumpulan data melalui pustaka dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti dokumen, buku, majalah, serta rekaman sejarah. Pendapat ini ditegaskan pula oleh Sarwono (2006 dalam Mirzaqon, 2017) yang menilai bahwa studi kepustakaan mencakup kegiatan menelaah dan mengkaji buku-buku referensi serta penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema untuk memperkuat dasar teori penelitian.

Selanjutnya, Nazir (1988 dalam Mirzaqon, 2017) menjelaskan bahwa teknik ini melibatkan pemeriksaan secara sistematis terhadap literatur, catatan, dan laporan ilmiah yang berkaitan dengan persoalan penelitian yang ingin diselesaikan. Sementara itu, Sugiyono (2012 dalam Mirzaqon, 2017) menekankan bahwa studi kepustakaan juga mencakup penelaahan terhadap teori, nilai, norma, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan situasi sosial yang sedang diteliti.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, penelitian ini dikategorikan sebagai riset kepustakaan (library research). Penggunaan metode ini dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, seperti disampaikan oleh para ahli sebelumnya, tidak semua data

dapat diperoleh dari penelitian lapangan; ada kalanya data yang paling relevan justru tersimpan dalam berbagai dokumen tertulis seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian. Kedua, studi kepustakaan memungkinkan peneliti memahami fenomena baru termasuk dinamika penggunaan bahasa di media sosial yang mungkin belum dapat diamati langsung. Melalui telaah literatur, gejala-gejala tersebut dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas sehingga peneliti dapat merumuskan konsep atau kerangka analisis yang tepat.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa data pustaka yang berasal dari penelitian sebelumnya, laporan ilmiah, ataupun literatur akademik tetap memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sebagaimana ditegaskan oleh Nazir (1988 dalam Mirzaqon, 2017). Dalam beberapa situasi, data lapangan bahkan tidak memberikan informasi yang cukup untuk menjawab fokus penelitian, sementara data pustaka justru mampu mengisi kekosongan tersebut.

Oleh karena penelitian ini memfokuskan kajian pada ***“Penerapan Bahasa Yang Beretika Di Media Sosial Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Warga Digital”***, maka sumber data yang digunakan terdiri atas buku-buku relevan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta literatur lain yang mendukung pembahasan terkait etika berbahasa, perilaku digital, dan komunikasi di ruang maya.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penciptaan Karya

A. Pengertian Warga Negara

Menurut Delvi Aflinda, warga negara merupakan individu dalam suatu negara yang memiliki hak serta kewajiban tertentu. Sedangkan Delvia Eka Syafitri mendefinisikan warga negara sebagai sekumpulan orang yang diakui keberadaannya oleh suatu negara dan memperoleh hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Ulfa Aulia Harahap menambahkan bahwa warga negara adalah sekelompok penduduk yang tinggal dan menetap hingga diakui sebagai bagian dari suatu negara.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa warga negara Indonesia terdiri atas penduduk asli Indonesia serta orang-orang keturunan bangsa lain yang disahkan melalui undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan dapat dimiliki baik oleh bangsa Indonesia asli maupun keturunan lain yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Indonesia.

Keanggotaan seseorang sebagai warga negara pada dasarnya merupakan bentuk keterikatan hukum dengan negara sehingga individu tersebut memiliki peran dalam menunjang kemajuan maupun kemunduran negara. Oleh karena itu, ketentuan mengenai siapa yang dapat menjadi warga negara harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu, negara harus mengakui hak setiap orang untuk memilih kewarganegaraan, menentukan tempat tinggal, berpindah, serta kembali ke wilayahnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Konsep dasar kewarganegaraan berkaitan dengan asas-asas kewarganegaraan baik melalui kelahiran, perkawinan, maupun alasan lainnya. Seorang warga negara idealnya memahami unsur-unsur kewarganegaraan, hak, serta kewajibannya sehingga mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis.

Secara umum, warga negara merupakan individu yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memperoleh hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban. Negara, pada sisi lain, juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya.

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai warga negara, antara lain Aristoteles yang memandang warga negara sebagai semua individu yang menjadi bagian dari kehidupan politik dalam negara. Menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota suatu komunitas politik yang membentuk negara. Koerniatmanto menyebutkan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus dan memiliki hubungan hak serta kewajiban timbal balik terhadap negara. Ko Swaw Sik memaknai warga negara sebagai setiap orang yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara, sedangkan Purwadarminta mendefinisikannya sebagai orang yang secara hukum termasuk ke dalam anggota suatu negara.

Menurut Stanley E. Ptnord dan Etner F. Peliger, warga negara merupakan kajian yang berkaitan dengan tugas pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, amandemen Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli serta orang bangsa lain yang memperoleh pengakuan melalui undang-undang.

Dengan demikian, warga negara adalah individu yang diakui sebagai anggota resmi suatu negara dan melekat padanya status hukum berupa hak dan kewajiban. Penentuan kewarganegaraan dapat dilatarbelakangi oleh tempat kelahiran, keturunan, jangka waktu menetap, serta faktor-faktor lain seperti ras atau kesamaan budaya. Pengakuan terhadap status kewarganegaraan dibuktikan melalui dokumen resmi, misalnya Kartu Tanda Penduduk atau paspor.

Busroh (2013:77-79) menjelaskan bahwa hubungan antara warga negara dan negara lebih kuat jika dibandingkan hubungan antara negara dan orang asing. Orang asing hanya terikat selama ia berada dalam wilayah negara, sedangkan warga negara tetap memiliki keterikatan meskipun tidak berada dalam wilayah negaranya.

Pembahasan mengenai warga negara pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang yang diakui sebagai anggota negara mempunyai hak serta kewajiban yang dijamin oleh aturan hukum. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika seseorang berada dalam ruang kehidupan nyata, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman yang kini banyak berlangsung di dunia digital. Seiring dengan pesatnya teknologi informasi, interaksi masyarakat tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, melainkan juga melalui media sosial yang menjadi ruang pertemuan publik. Kondisi tersebut menandai adanya perluasan peran warga negara menjadi warga digital yang terlibat aktif, berkomunikasi, dan melakukan berbagai kegiatan melalui media berbasis internet.

Dalam kaitan inilah, penggunaan bahasa yang santun dan bertanggung jawab di media sosial dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara untuk menjaga tata krama serta etika komunikasi di ruang publik. Sebagaimana dalam kehidupan nyata seseorang wajib menghormati hak orang lain dan mematuhi ketentuan hukum, maka di media sosial pun warga digital dituntut untuk menerapkan bahasa yang tidak menimbulkan provokasi, tidak menyebarkan informasi menyesatkan, serta tidak mengandung ujaran kebencian. Dengan demikian, sikap beretika dalam berbahasa di media sosial merupakan salah satu wujud nyata tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup langsung maupun dalam ranah digital.

Berangkat dari pemahaman itu, etika dalam bertutur tidak sekadar persoalan pemilihan kata, namun merupakan gambaran dari kesadaran moral yang relevan dengan konsep kewargaan digital yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara berbahasa yang santun khususnya dalam ruang publik seperti media sosial menunjukkan bagaimana seseorang menghormati pengguna lain, mengetahui batasan interaksi, dan menjaga kenyamanan komunikasi dalam ranah digital. Karena itu, kajian mengenai etika berbahasa di media sosial memiliki keterkaitan langsung dengan tanggung jawab warga digital, sebab aspek komunikasi menjadi salah satu indikator penting yang merekam kualitas partisipasi seseorang dalam lingkungan digital.

Dengan merujuk pada pandangan Noviani, Adha, dan Rohman (2022), dapat dipahami bahwa keberadaan seseorang sebagai warga digital bukan hanya diukur dari kemampuan mengoperasikan teknologi atau internet, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap ketika

beraktivitas di dunia maya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai etika pada media sosial merupakan bagian penting dari perilaku warga digital. Apabila seseorang mampu memahami aturan, memilah informasi secara bijaksana, dan memperlihatkan tanggung jawab dalam berkomunikasi secara daring, maka praktik berbahasa yang etis pada media sosial menjadi salah satu bukti bahwa individu itu telah menjalankan perannya sebagai warga digital yang bertanggung jawab.

B. Bentuk-Bentuk Penggunaan Bahasa Beretika

Penggunaan bahasa yang santun merupakan bagian penting dari komunikasi yang baik dan bertanggung jawab, baik ketika berbicara, menulis, maupun berinteraksi di ruang digital seperti jejaring sosial. Etika dalam berbahasa pada dasarnya menuntut kita untuk memilih ungkapan yang sopan, tidak melukai perasaan pihak lain, serta menjauhi penyebaran informasi yang keliru ataupun bentuk ujaran kebencian. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, komunikasi akan berjalan lebih harmonis, relasi antarmanusia dapat terjalin dengan baik, dan citra pribadi ataupun lembaga akan semakin positif.

Beberapa contoh penerapan etika berbahasa antara lain:

1. Menggunakan tutur kata yang sopan dalam setiap bentuk komunikasi.
2. Menghargai keberagaman latar budaya, agama, dan pandangan orang lain, termasuk saat terjadi perbedaan pendapat.
3. Menjauhi kata-kata kasar, ungkapan bermuatan SARA, maupun kritik yang menjatuhkan.
4. Menjaga privasi seseorang dan tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin.
5. Menggunakan bahasa yang netral dan tidak memihak, mengutamakan fakta serta mencari penyelesaian ketika terjadi perselisihan.
6. Mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati saat berkomunikasi langsung.
7. Mengutamakan bahasa resmi dan santun ketika berada pada situasi formal.
8. Saat berkomunikasi di media sosial, pengguna harus lebih bijak dan bertanggung jawab agar tidak memicu kesalahpahaman maupun pertentangan.

C. Faktor Yang Memengaruhi Etika Berbahasa

Faktor pertama yang memengaruhi perubahan bentuk bahasa mahasiswa ialah keberadaan media sosial serta ragam platform digital yang menjadi ruang berkembangnya kosakata baru. Temuan wawancara menunjukkan bahwa hampir 89% partisipan menghabiskan lebih dari empat jam setiap hari beraktivitas di dunia maya, sehingga pola

pemakaian bahasa mereka banyak dipengaruhi oleh interaksi daring tersebut. Platform seperti TikTok, Twitter, dan Instagram berperan sebagai wadah penyebaran istilah baru yang dengan cepat diikuti dan dipakai dalam percakapan harian. Sejalan dengan apa yang disampaikan Permana dan Rahmawati (2023), media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga semacam arena eksperimentasi linguistik tempat ragam istilah dicoba, dipromosikan, lalu menjadi bagian dari bahasa umum.

Faktor berikutnya terkait dengan kebutuhan untuk menunjukkan identitas sekaligus rasa kebersamaan dalam kelompok. Hasil observasi etnografis memperlihatkan bahwa mahasiswa Pendidikan Antropologi membentuk sejumlah kelompok kecil berdasarkan minat dan latar belakang tertentu; masing-masing kelompok kemudian mengembangkan gaya bahasa khas yang menjadi tanda keanggotaan. Kondisi ini selaras dengan gagasan “speech community” dalam kajian sosiolinguistik sebagaimana dijelaskan Firmansyah dan Nurhayati (2022). Dalam konteks ini, penggunaan istilah tertentu, aksen khusus, atau susunan kalimat yang berbeda menjadi sarana mahasiswa menegaskan identitas dan solidaritas kelompok. Misalnya, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan etnografi cenderung menyisipkan istilah-istilah antropologi dalam percakapan sehari-hari sebagai bentuk identitas akademiknya.

Selain itu, latar sosial, budaya, serta bahasa mahasiswa menjadi faktor lain yang turut membentuk dinamika bahasa mereka. UNIMED sebagai kampus di wilayah Sumatera Utara menaungi mahasiswa dari beragam latar etnis seperti Batak, Melayu, dan Jawa. Dari penelitian ini diketahui bahwa sekitar 68% responden masih aktif memakai bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan teman satu daerah, yang selanjutnya tercampur dalam bahasa Indonesia yang digunakan di lingkungan kampus. Pratiwi dan Siregar (2022) menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “interferensi positif” yang justru memperkaya ragam ekspresi dan mencerminkan identitas budaya mahasiswa. Kondisi ini juga memperjelas munculnya fenomena percampuran kode antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari.

Faktor keempat berhubungan dengan dampak globalisasi serta semakin terbukanya akses pendidikan tinggi. Mahasiswa generasi Z, yang tumbuh bersamaan dengan arus global, cenderung sering mengadopsi istilah dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris ke dalam percakapan harian mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa 82% responden merasa penggunaan istilah berbahasa Inggris memberi kesan lebih modern sekaligus intelektual. Temuan tersebut sejalan dengan konsep “linguistic prestige” Gunawan dan Hartati (2023) yang menerangkan bahwa bahasa asing kerap dipandang memiliki gengsi sosial yang lebih tinggi. Meski begitu, fenomena ini memunculkan kekhawatiran dari kalangan dosen terkait

kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan antropologi ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Di samping empat aspek utama tersebut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan institusi juga memiliki dampak terhadap praktik bahasa mahasiswa. Program Studi Pendidikan Antropologi UNIMED sejatinya menetapkan sejumlah aturan penggunaan bahasa dalam konteks akademik, termasuk kewajiban memakai Bahasa Indonesia baku pada penulisan tugas dan skripsi. Kendati demikian, penerapan kebijakan ini masih belum berjalan maksimal, ditunjukkan oleh 63% responden yang mengaku tidak pernah menerima masukan khusus mengenai penggunaan bahasa dalam tugas yang mereka kerjakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahman dan Hasibuan (2022) yang menegaskan perlunya kebijakan kebahasaan yang jelas dan konsisten untuk meningkatkan kesadaran sekaligus kemampuan bahasa mahasiswa di perguruan tinggi.

D. Dampak Penerapan Atau Pelanggaran Etika Bahasa

Etika berbahasa merupakan seperangkat kaidah yang mengatur cara seseorang menggunakan bahasa dengan menghargai lawan bicara, memperhatikan situasi komunikasi, serta menjaga kesopanan. Penerapan etika tersebut membawa sejumlah manfaat penting. Dalam kehidupan sosial, penggunaan bahasa yang santun dapat memperkuat relasi antarmanusia, menumbuhkan rasa saling percaya, sekaligus membangun iklim komunikasi yang lebih harmonis. Contohnya dapat terlihat pada aktivitas pembelajaran di sekolah, di mana guru yang memilih gaya bahasa yang ramah dan jelas cenderung membuat peserta didik merasa dihargai sehingga proses penyampaian pelajaran berlangsung lebih efektif. Di ranah profesional, penggunaan bahasa yang sesuai norma juga berdampak pada peningkatan reputasi serta kredibilitas personal maupun lembaga. Bahasa yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman sehingga komunikasi berlangsung lebih terarah tanpa memicu perselisihan.

Dalam kehidupan berbasis digital, penerapan etika berbahasa menjadi semakin relevan. Komunikasi melalui media sosial, forum, dan percakapan daring akan lebih sehat apabila dilakukan dengan memperhatikan kesantunan dan tidak menyinggung pihak lain. Sikap kritis tetap dapat disampaikan tetapi dengan pilihan kata yang tepat, sehingga diskusi lebih dialogis dan tidak menjurus pada provokasi. Pendidikan etika bahasa pada generasi muda turut berperan untuk menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun kekerasan verbal di dunia maya. Kebiasaan berbahasa yang bertanggung jawab dapat mengurangi risiko perundungan siber, konflik antarpengguna, maupun pertikaian digital yang sering muncul akibat penggunaan bahasa yang agresif.

Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika berbahasa dapat memunculkan berbagai persoalan. Penggunaan ungkapan yang kasar, menyerang, atau merendahkan pihak lain berpotensi memicu ketegangan personal maupun konflik sosial. Di media sosial, pelanggaran tersebut dapat terlihat melalui praktik body-shaming, cyberbullying, penyebaran fitnah hingga ujaran kebencian. Situasi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan berkomunikasi, tetapi juga dapat menurunkan martabat seseorang, merusak relasi antarwarga, bahkan mencederai reputasi individu maupun kelompok tertentu. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran etika berbahasa juga berujung pada permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran aturan komunikasi digital.

Dampak negatif lainnya berkaitan dengan aspek psikologis. Tuturan yang bersifat hinaan atau intimidatif berpotensi menimbulkan tekanan emosional, mengurangi rasa percaya diri, dan menyebabkan ketidaknyamanan psikologis bagi pihak yang menjadi sasaran. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang santun memberikan rasa aman, dihormati, dan diterima sehingga mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Lingkungan komunikasi yang menjunjung etika berbahasa akan lebih kondusif bagi pertukaran gagasan, kerjasama, dan proses belajar.

Secara keseluruhan, penerapan etika bahasa memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya komunikasi yang produktif baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun ruang digital. Sebaliknya, kelalaian dalam mematuhi prinsip etika bahasa berpotensi memunculkan persoalan interpersonal, hukum, maupun psikologis. Oleh karena itu, kemampuan menerapkan etika berbahasa merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu ditanamkan agar proses komunikasi berjalan secara efektif dan menghargai sesama.

E. Analisis Penerapan Etika Berbahasa sebagai Wujud Tanggung Jawab Warga Digital

Dari konsep mengenai warga negara yang sebelumnya dibahas, memberikan dasar pemahaman bahwa setiap individu bukan hanya memiliki hak dalam struktur kenegaraan, tetapi juga memikul kewajiban moral dan sosial yang melekat pada status kewargaan tersebut. Ketika aktivitas masyarakat bertransformasi ke ruang digital, kewajiban ini tidak lagi terbatas pada tindakan di ranah fisik, melainkan ikut bergeser menjadi bagian dari perilaku komunikasi yang ditampilkan melalui media sosial. Dalam konteks inilah lahir gagasan mengenai warga digital, yaitu individu yang berpartisipasi dalam ruang maya dan turut bertanggung jawab menjaga kualitas interaksi di dalamnya. Karena ruang digital merupakan perluasan ruang publik, maka praktik berbahasa yang ditampilkan di media sosial

merupakan manifestasi paling nyata bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawab kewargaan digitalnya.

Praktik bahasa yang beretika pada dasarnya tidak hanya mencerminkan kemampuan linguistik semata, melainkan menunjukkan bagaimana seseorang memahami nilai, norma, dan konsekuensi dari setiap tuturan yang ia sampaikan. Media sosial yang bersifat cepat, terbuka, dan interaktif menuntut ketelitian dalam memilih kata, mempertimbangkan konteks, dan menghindari bentuk tuturan yang berpotensi menyakiti atau merugikan orang lain. Kesantunan, ketepatan diksi, pengendalian emosi, serta kemampuan menjaga objektivitas menjadi unsur penting yang menentukan kualitas komunikasi seseorang di ruang digital. Ketika etika bahasa diterapkan dalam interaksi sehari-hari di media sosial, pengguna tidak hanya menjaga relasi sosial, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa ia memahami perannya sebagai bagian dari komunitas digital yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan bahasa yang beretika menjadi wujud konkret dari tanggung jawab warga digital sebagaimana tercermin dalam judul penelitian ini.

Perilaku berbahasa di media sosial tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai faktor sosial, budaya, dan teknologi membentuk pola komunikasi seseorang. Media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan lahirnya kreativitas linguistik, tetapi pada saat yang sama juga mendorong lahirnya praktik berbahasa impulsif, emotif, dan kadang tidak mempertimbangkan norma kebahasaan. Latar belakang budaya, identitas kelompok, intensitas penggunaan media sosial, serta pengaruh globalisasi menjadi penting dalam menentukan bagaimana seseorang memaknai kesantunan dan etika berbahasa. Faktor-faktor tersebut memengaruhi sensitivitas pengguna terhadap konteks publik sehingga menentukan apakah ia mampu mempertahankan etika dalam komunikasi digital. Dalam kerangka tanggung jawab warga digital, kemampuan untuk menavigasi berbagai faktor tersebut menjadi bagian dari literasi digital yang esensial karena hanya dengan memahami dinamika tersebut seseorang dapat menjaga kualitas dan keamanan interaksi di media sosial.

Dampak yang ditimbulkan dari penerapan atau pelanggaran etika bahasa memperlihatkan betapa besarnya peran bahasa dalam membentuk relasi sosial di ruang digital. Ketika etika diterapkan secara konsisten, komunikasi menjadi lebih konstruktif, konflik dapat diminimalisir, dan lingkungan digital terbentuk menjadi ruang yang aman bagi semua pengguna. Namun, ketika etika diabaikan, media sosial dapat berubah menjadi ruang yang penuh dengan agresi verbal, misinformasi, dan serangan personal yang menimbulkan tekanan psikologis, keretakan sosial, bahkan persoalan hukum. Situasi ini menguatkan

pemahaman bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen sosial yang membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan digital. Dengan demikian, penerapan bahasa yang beretika bukan lagi pilihan individual, tetapi merupakan kewajiban moral yang melekat pada setiap warga digital untuk menjaga keberlangsungan ruang publik yang sehat dan beradab. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa etika berbahasa dalam ranah media sosial tumbuh menjadi salah satu bentuk yang paling nyata dari tanggung jawab warga digital. Melalui bahasa, seseorang menunjukkan identitas, nilai yang dianut, serta kepeduliannya terhadap sesama pengguna. Di tengah perkembangan teknologi yang terus mendorong mobilitas informasi, kemampuan untuk menjaga etika berbahasa menjadi penanda kedewasaan dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, implementasi bahasa yang beretika bukan hanya bagian dari kesadaran linguistik, tetapi juga cerminan dari komitmen untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam judul jurnal ini.

SIMPULAN

Penelitian mengenai penerapan bahasa beretika di media sosial menunjukkan bahwa transformasi digital telah memperluas makna kewargaan dalam konteks modern. Warga negara kini tidak hanya berperan di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital yang menuntut tanggung jawab etis dalam berkomunikasi. Etika berbahasa menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas interaksi, melindungi hak sesama pengguna, serta menciptakan lingkungan digital yang sehat. Analisis yang dilakukan terhadap aspek konsep kewargaan, bentuk etika berbahasa, faktor-faktor yang memengaruhi dinamika bahasa, serta dampak penerapan dan pelanggaran etika menunjukkan bahwa perilaku berbahasa di media sosial merupakan fenomena dipengaruhi berbagai aspek sosial, budaya, teknologi, serta psikologis. Penerapan bahasa yang sopan dan bertanggung jawab membawa manfaat signifikan bagi hubungan interpersonal, stabilitas sosial, dan keamanan digital. Sebaliknya, pelanggaran etika berbahasa berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara sosial, emosional, maupun hukum. Oleh karena itu, etika berbahasa harus menjadi salah satu kompetensi penting literasi digital. Dengan disadari akan dampak komunikasinya, kemampuan memilih kata dengan bijaksana, menghormati sesama warga, menjadi indikasi kematangan warga digital. Secara sungguh-sungguh penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat edukasi secara etis berbahasa dan literasi digital dalam pembangunan agar interaksi di media sosial tidak hanya terlaksana dengan efektif tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat pada era digital.

REFERENSI

- Amirun Aminin Tanjung, Kiki Rahmayani Hasibuan, Irshan Fikli, & Selvi Rahmayani. (2025). *Etika Menggunakan Bahasa*. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 5(3), 113-122.
- Benimaking & Setyaningsih. (2025). *Sosialisasi Etika Berbahasa Untuk Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi di Media Sosial Pada Siswa-Siswi Mts Negeri 4 Flores Timur*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(3), 55-62. DOI: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10033>
- Busroh, Abu Daud. (2013). *Ilmu Negara* (Cetakan Kesembilan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Filsip, A. (2021). *Warga Negara dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Filah, N. (2020). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
- Firmansyah, R., & Nurhayati, Y. (2022). *Speech Community dan Identitas Linguistik: Studi Kasus pada Kelompok Mahasiswa Antropologi*. Jurnal Linguistik Terapan, 12(1), 56-71.
- Isman, A., & Gunggoren, O. C. (2014). *Digital citizenship*. Turkish Online Journal of Education Technology, 13(1), 73-77. (dikutip dalam Noviani dkk., 2022)
- Mayrita, dkk. (2025). *Language Politeness In Digital Streaming: The Implications To Education And Ethics In Communications For The Technological Era*. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi, 9(3), 1079-1090.
- Nana, dkk. (2025). *Etika Media Sosial dan Implikasinya bagi Individu dan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 2(3), 288-299. DOI: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.295>
- Noviani, A., Adha, M. M., & Rohman, R. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Daring Terhadap Sikap Digital Citizenship Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PPKn*. Jurnal Global Citizen, XI(2), 9-20.
- Permana, I., & Rahmawati, D. (2023). *Media Sosial sebagai Laboratorium Bahasa: Studi Kasus pada Kreasi dan Difusi Istilah Baru di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Komunikasi dan Media, 7(1), 89-107.
- Pratiwi, D., & Siregar, M. (2022). *Interferensi Positif dalam Komunikasi Mahasiswa Multilingual di Indonesia Timur*. Jurnal Linguistik Terapan, 12(2), 78-96.

- Ramadhan, S., Dewirahmadanirwati, D., Hasnul Ulya, R., & Jamaluddin, N. B. (-). *The Coagulation of Politeness and Character in Indonesian Language Learning in the Digital Era*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan.
- Silaban, G. H., Pangaribuan, M. S., Simanjuntak, P. A., & Surip, M. (2024). *Pengaruh Etika Berbahasa Indonesia Yang Buruk di Media Sosial Terhadap Individu*. Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris, 2(2), 104-110.
- Soegito, A. T. (2005). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Depdiknas Dirjen Dikti, Jakarta, 12-23 Desember 2005.
- Triyono, S., Sahayu, W., & Yuliana, F. (2025). *Politeness and impoliteness by teachers and students in technology-assisted teaching and learning process*. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 15(2), 320-331.
- Ulinnuha, & Hikmah. (2025). *Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Media Sosial: Antara Kreativitas dan Norma Kebahasaan Pada Unggahan di Media Sosial Instagram*. Jotika Journal in Education, 4(2).
- Wahyunengsih, W., & Permana Sari, A. A. (-). *Penerapan Kesantunan dalam Percakapan Berbahasa Inggris Online dengan Penutur Asing melalui Synchronous Media*. Jurnal Lentera.
- Wulandari, dkk. *Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif*. Jurnal Literasiologi, 11(2). DOI: <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>